

KOHESI SOSIAL MASYARAKAT KAIMANA DI TENGAH KONFLIK

PAPUA



Disusun Oleh :

KANISIUS LAGA DONI

4515022005

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk memenuhi Salah Satu
Syarat Mencapai Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Sosiologi (S.Sos)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2020

HALAMAN PENERIMAAN

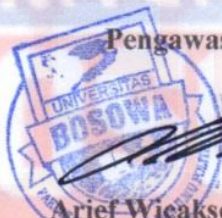
Pada hari ini, Kamis Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Skripsi dengan Judul

KOHESI SOSIAL MASYARAKAT KAIMANA DI TENGAH KONFLIK PAPUA

Nama : KANISIUS LAGA DONI
Nomor Stambuk : 4515022005
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Sosiologi

Telah Di Terima Oleh Panitia Ujian SKRIPSI Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Sosiologi.

Pengawas Umum:



Arief Wicaksono, S.Ip, MA
Dekan FISIP Universitas Bosowa

Panitia Ujian:

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S

Pembimbing II

Andi Burchanuddin S.Sos, M.Si

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S
2. Andi Burchanuddin S.Sos, M.Si
3. Dr. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
4. Dr. Harifudin Halim. S.Pd., M.Si

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari ini, Kamis Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Skripsi dengan Judul

KOHESI SOSIAL MASYARAKAT KAIMANA DI TENGAH KONFLIK PAPUA

Nama : KANISIUS LAGA DONI
Nomor Stambuk : 4515022005
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Sosiologi

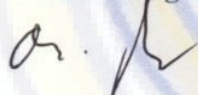
Telah Di Terima Oleh Panitia Ujian SKRIPSI Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Sosiologi.

Pengawas Umum:


Arief Wicaksono, S.Ip,MA
Dekan FISIP Universitas Bosowa

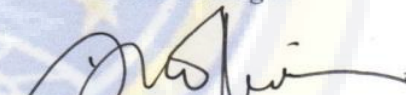
Panitia Ujian:

Pembimbing I



Prof.Dr.H.Husain Hamka,M.S

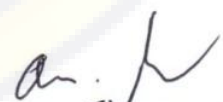
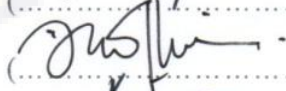
Pembimbing II




Andi Burchanuddin S.Sos, M.Si

Tim Penguji:

1. Prof.Dr.H.Husain Hamka,M.S
2. Andi Burchanuddin S.Sos, M.Si
3. Dr,Hj. Nurmi Nonci, M.Si
4. Dr.Harifudin Halim.S.Pd.,M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang telah mengatur dan menetapkan ketentuan hidup yang harus dilalui oleh kita sebagai makhluk ciptaan-Nya. Hanya Dia-lah dengan segala kekuasaan-Nya senantiasa memberikan Nikmat kepada semua Insan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul “Koherensi Sosial Masyarakat Kaimana Di Tengah Konflik Papua”. Pergumulan serta Doa atau hubungan Transendental dengan Tuhan semoga tercurahkan kepada kita sekalian, kepada kita umatnya harus tetap komitmen dalam menegakkan keteguhan dengan Tuhan, Penulis sepenuh hati menyadari bahwa skripsi ini selesai bukan merupakan hasil dari diri pribadi sepenuhnya, namun berkat Tuhan dan bantuan dari semua pihak yang turut berkontribusi dalam memberikan bantuan berupa doa, semangat, pengorbanan, moral ataupun materil, serta keikhlasan dalam membimbing penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan baik ini penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis. Dengan segala ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muh Saleh Pallu, M.Eng Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Arief Wicaksono, S.ip, MA Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Unibos Makassar.
3. Dr. Hj. Asmirah, M.Si sebagai ketua Jurusan Ilmu Sosiologi yang mengajarkan makna kesabaran serta seluruh dosen yang telah menjadi

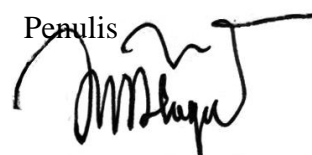
fasilitator dalam memperoleh ilmu selama belajar di Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar.

4. Prof. Husain Hamka, M.Si dan Andi Burchanuddin, S.Sos M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus ikhlas telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta Ayahanda David Baronama, Ibunda Sesilia Niron (Alm), dan Kakak Yosaphat Lamawuran serta keluarga besar Lamawuran yang selalu memberikan semangat, dukungan, nasihat dan doa tiada henti sehingga sampai detik ini serta selalu memberikan motivasi hidup dalam menggapai cita-cita penulis.
6. Kawan-kawanku di Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) dalam setiap diskusinya, dan seluruh teman teman Himpunan Mahasiswa Sosiologi, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah selalu merestui, Amin.

Makassar, 22 Maret 2021

Penulis



Kanisius Laga Doni

PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kanisius Laga Doni

Tempat/Tgl Lahir : Hinga, 01 November 1995

NIM : 45 15 022 005

Jurusan/Prodi : Sosiologi

Judul Skripsi : Kohesi Sosial Masyarakat Kaimana Di Tengah
Konflik Papua

Dosen *Pembimbing* : 1. Prof. Husain Hamka, M.Si

2. Andi Burchanuddin, S.Sos, M.Si

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis. Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh ujian meja/ tutup.

Makassar, 22 Maret 2021

Penulis,



Kanisius Laga Doni

NIM 45 15 022 005

ABSTRAK

Kanisius Laga Doni (NIM: 45 15 022 005). Kohesi Sosial Masyarakat Kaimana di Tengah Konflik Papua Prof. Husain Hamka, M.Si sebagai prmbimbing I dan **Andi Burhanuddin, S.sos, M.Si** selaku Pembimbing II.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Kohesi Sosial Masyarakat Kaimana di Tengah Konflik Papua. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana tindakan sosial masyarakat di Kabupaten Kaimana di tengah konflik Papua. Objek penelitian ini adalah stakeholder dan masyarakat Kabupaten Kaimana dengan memilih 5 informan. Dengan menggunakan metode kualitatif, Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yang lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis mengutamakan Penghayatan, Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan *purposive sampling* teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pertama, bahwa dalam kesempatan kerja dalam pemerintahan serta kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat asli Papua dan non Papua mempunyai kesempatan yang sama dan selalu menjaga hubungan keharmonisan yang sudah ditanamkan sejak dahulu sehingga isu konflik Papua tidak menjadi domain untuk memecah belah persaudaraan yang ada di Kabupaten Kaimana. Kedua, bentuk kohesi sosial yang dilakukan adalah dengan cara sikap saling menghargai dan saling menghormati. Masyarakat

Kaimana dalam merespon isu rasisme dengan solidaritas yang sangat kuat sehingga menggelar demonstrasi dengan aksi damai serta lebih bijak dan mengedepankan rasa persaudaraan. Ketiga, peran stakeholder sangat di butuhkan terkait perkembangan masyarakat melalui kebijakan atau sosialisai serta himbauan terhadap masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dan stakeholder tak dapat di pisahkan melainkan kerja sama sehingga terwujudnya masyarakat kaimana yang sejahtera dan menjauhkan masyarakat dari konflik yang memecah bela masyarakat.

Kata Kunci : Kohesi Sosial, Konflik, Dan Bentuk-Bentuk Kohesi Sosial.

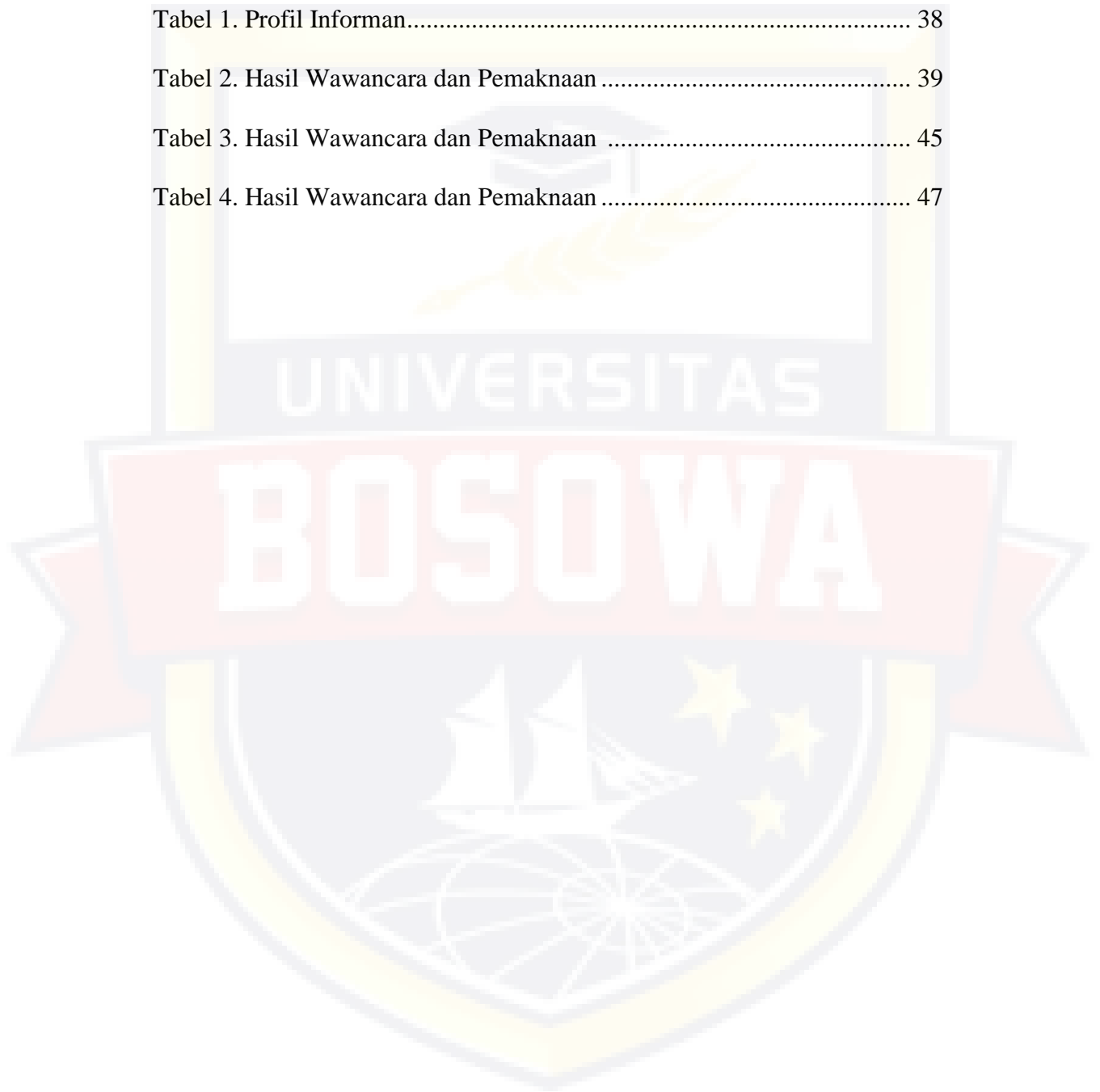
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PENERIMAAN	III
KATA PENGANTAR	IV
PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI	VI
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR BAGAN	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Kohesi Sosial.....	5
B. Pengertian Masyarakat	6
C. Pengertian Konflik	11
D. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25

C. Subjek Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisa Data.....	27
G. Teknik Keabsahan Data	29
H. Operasionalisasi Konsep.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kaimana	31
B. Wilayah Administrasi	32
C. Kondisi Sosial Ekonomi di Kaimana	33
D. Adat-Istiadat di Kabupaten Kaimana.....	34
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Informan	38
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan.....	51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Informan.....	38
Tabel 2. Hasil Wawancara dan Pemaknaan	39
Tabel 3. Hasil Wawancara dan Pemaknaan	45
Tabel 4. Hasil Wawancara dan Pemaknaan	47



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Konseptual.....	23
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kaimana merupakan kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Fak-fak. Kabupaten Kaimana memiliki delapan suku asli Kaimana yakni suku Irarutu, Kuri, Mairasi, Oburau, Medewana, Napiti, Myere, dan Kouwayi. Kondisi adat istiadat di Kabupaten Kaimana oleh karena letaknya yang strategis sebagai tempat persinggahan masyarakat dari berbagai daerah telah mendapat pengaruh budaya dari luar (interaksi sosial). Sehingga nilai-nilai adat asli daerah ini telah terakulturasi oleh nilai-nilai budaya sekitar dan menciptakan sebuah kehidupan masyarakat yang multikultural. Begitupun kehidupan komposisi pemeluk agama di Kaimana terlihat cukup beragam yakni Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, dan Budha. Kondisi kerukunan dan toleransi umat beragama berjalan dengan baik, walaupun mayoritas pendudukannya beragama Kristen Protestan, yang notabenehnya masyarakat asli Papua (Arif Wibowo, 2009).

Setiap suku-suku yang ada di Kabupaten Kaimana pendatang maupun asli Papua, merupakan organisasi sosial. Hakikatnya adalah mengatur anggota masyarakatnya tertib, teratur, aman, damai, dan sejaterah untuk menuju hakikat itu semua elemen atau organisai kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kaimana selalu mengatur, mengurus bagaimana anggota masyarakat itu memenuhi kebutuhan pokok jasmani maupun rohani dan sebagai perekat untuk merajut nilai-

nilai persaudaraan, serta kearifan dalam satu sistem sosial yang ada di Kabupaten Kaimana, dan nilai-nilai ini yang melahirkan toleransi terhadap agama dan adat istiadat yang ada di Kaimana.

Pertahanan masyarakat Kaimana dalam ruang lingkup kohesi sosial jelas terlihat ditengah konflik Papua yang terjadi. Pada awal terjadinya konflik Papua, situasi masyarakat Kaimana masih kondusif dan terlihat kurang merespon konflik yang tengah dialami oleh kabupaten lain di Papua. Imbas dari konflik Papua tergiring masuk dalam Kabupaten Kaimana sehingga munculah aksi solidaritas pada tanggal 19-20 Agustus 2019. Aksi solidaritas tersebut sebagai bentuk penolakan dan kepedulian segenap masyarakat Kaimana atas perlakuan ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Aksi tersebut spontan dilakukan oleh segenap masyarakat Kaimana baik suku asli Papua maupun suku-suku pendatang yang berada di Kabupaten Kaimana. Aksi solidaritas yang berlangsung, didukung penuh oleh Dewan Adat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (terdiri dari bupati, wakil bupati, kapolres, ketua DPRD, dan kejaksaan negeri). Dalam aksi tersebut tidak ada tindakan anarkis yang berujung ricuh seperti yang terjadi di kabupaten-kabupaten Papua dan Papua Barat lainnya. Aksi ini tidak memberikan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat Kaimana.

Dengan melihat fenomena sosial yang terjadi, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, dengan fokus penelitian sebagaimana rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan tentang kohesi sosial masyarakat di tengah konflik Papua di Kabupaten Kaimana sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Kaimana tidak terimbas dari konflik Papua?
2. Bagaimana bentuk kohesi sosial masyarakat yang terbangun di tengah terjadinya konflik Papua?
3. Seperti apakah peran stakeholder dalam menjaga kohesi sosial di Kaimana?

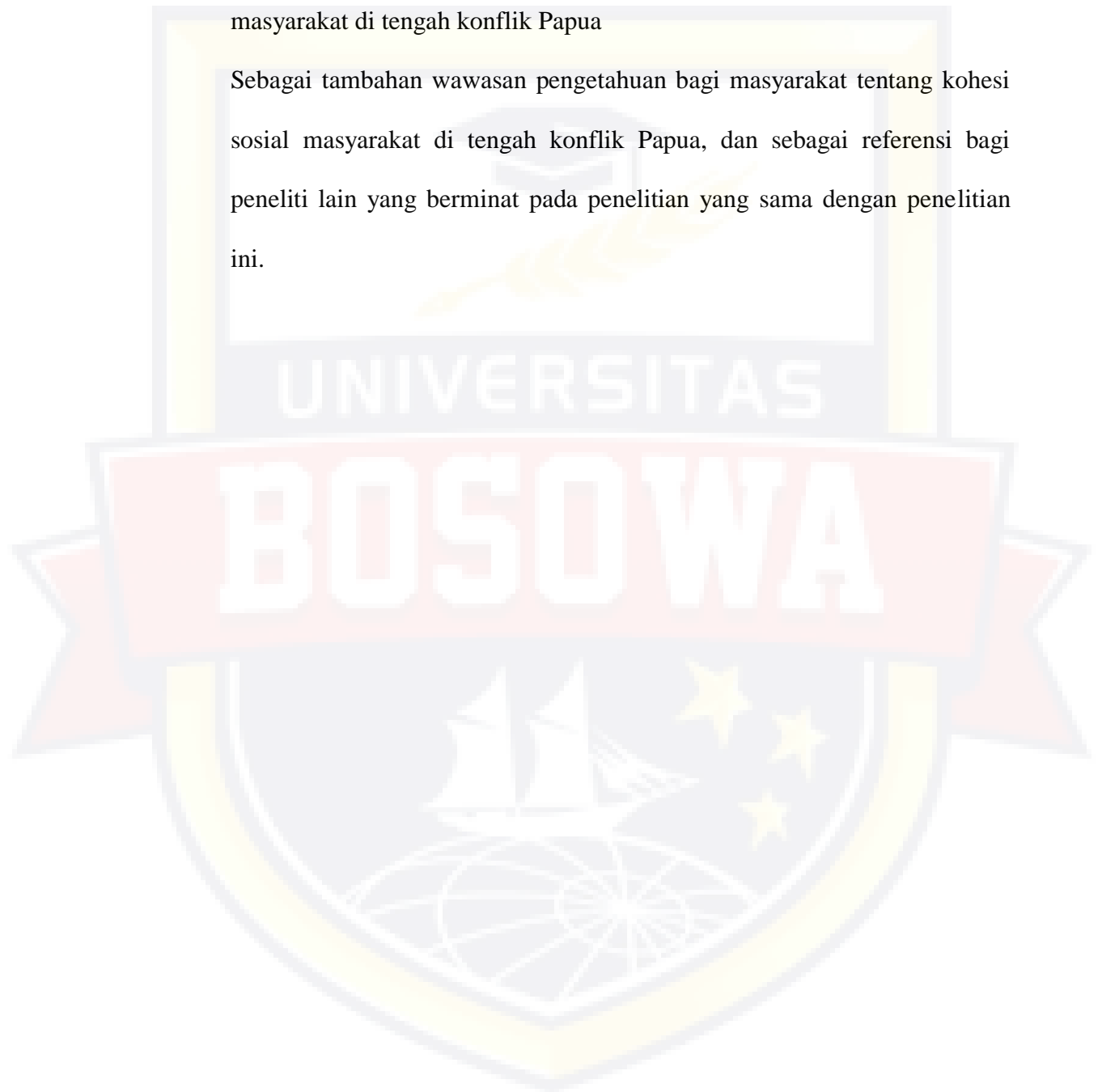
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kenapa masyarakat Kaimana tidak terimbas di tengah konflik Papua.
 - b. Untuk mengetahui apa yang membentuk kohesi sosial masyarakat Kaimana.
 - c. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan stakeholder dalam menjaga hubungan di tengah konflik Papua.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Manfaat teoritis/ akademis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut bagi mengenai kohesi sosial masyarakat di tengah konflik Papua

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang kohesi sosial masyarakat di tengah konflik Papua, dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kohesi Sosial

Ada berbagai definisi kohesi sosial menurut Forrest dan Kearns (2001), menyatakan bahwa ranah-ranah kohesi sosial adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai bersama dan sebuah budaya warga (*civic culture*).
2. Keteraturan sosial dan kendali sosial.
3. Solidaritas sosial.
4. Jejaring sosial dan modal sosial.
5. Kelekatan dan identifikasi pada tempat.

Pengertian ini masih bersifat sosiologis (sebagaimana kebanyakan studi tentang kohesi sosial) dan menjadi dasar pengukuran kohesi atau kerekatan sosial secara objektif. Pada 1990, Bollen dan Hoyle mengisi kesenjangan literatur yang ada mengenai kohesi sosial. Menurut mereka di samping pengukuran objektif, pengukuran terhadap persepsi individual anggota kelompok mengenai tingkat kohesinya dengan kelompok juga tidak boleh diabaikan karena persepsi ini berpengaruh pada tingkah laku individu tersebut maupun tingkah laku kelompok secara keseluruhan. Konstruk mereka dinamai persepsi kohesi sosial bersifat subjektif psikologis.

Jenson (1998) yang dikutip oleh Kulig *et al* (2014) menyebutkan beberapa dimensi dalam kohesi sosial: 1) milik; berarti nilai-nilai bersama, identitas,

perasaan komitmen, 2) inklusi; menyangkut kesempatan akses yang sama, 3) partisipasi; kemauan anggota untuk terlibat, 4) pengakuan; membahas isu menghormati dan toleransi perbedaan dalam masyarakat pluralis, dan 5) legitimasi; pengakuan dari para anggota mengenai anggota lainnya.

Kohesi sosial diartikan sebagai kekuatan, baik positif maupun negative, yang menyebabkan anggota tetap bertahan dalam komunitas. Kohesi sosial dapat meningkat seiring dengan tingginya rasa suka antara anggota. Anggota dapat saling menyukai ketika mereka saling menerima (Taylor, *et al* 2009).

Kohesi sosial merupakan perasaan “*we feeling*” yang mempersatukan setiap anggota menjadi satu bagian. Rasa memiliki tersebut juga dapat membentuk kohesi sosial antar individu dalam satu komunitas rasa memiliki ini yang membuat individu menyadari bahwa ia merupakan bagian dari komunitas. *Sense of Community index* (SCI) adalah ukuran kuantitatif yang paling sering digunakan dalam mengukur rasa komunitas pada ilmu sosial (Myres, 2010).

B. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*) yang selalu berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian masyarakat yang diungkapkan oleh (Abdulsyani 2007) kata masyarakat berasal dari musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut Maclver dan Page dalam Soejono Sukanto (2009: 22) Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dengan kerja sama antara berbagai kelompok dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.

Menurut Auguste Comte dalam Abdulsyani (2007: 31) Masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan sendiri.

Menurut Linton (1936) masyarakat merupakan sekelompok manusia yang cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan dengan batas-batas tertentu.

Menurut Soejono Soekanto (1982) masyarakat atau komunitas adalah menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, di mana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.

Pengertian masyarakat menurut beberapa pakar sosiologi (Setiadi, 2013).
Dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- b. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

c. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda, sebagai contoh ketika seseorang melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sistem wisata antara lain biro wisata, pengelola wisata, rumah makan, penginapan dan lain-lain.

1. Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat

Ciri-ciri kehidupan masyarakat menurut: (Soerjono Soekanto, 1986) sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu.
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama.
- c. Menyadari kehidupan mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya

2. Dinamika Masyarakat

Manusia selalu memiliki rasa untuk hidup berkelompok akibat dari keadaan lingkungan yang selalu berubah atau dinamis. Perubahan-perubahan tersebut memaksa manusia memakai akal, kreativitas, perasaan serta daya

tahannya untuk menghadapi seperti dalam kondisi suhu udara dingin membutuhkan jaket yang dibuat ditukang jahit, dalam kondisi lapar seseorang pergi ke warung untuk mencari makan, dalam kondisi sakit seseorang berobat ke rumah sakit untuk kesembuhannya, untuk mencari ikan di tengah laut seorang manusia membutuhkan kapal dan lain sebagainya. Para ilmuwan dibidang sosial sepakat bahwa kehidupan manusia tidak statis tetapi akan selalu berubah (dinamis), kondisi ini yang disebut sebagai perubahan sosial (Narwoko, 2007).

3. Faktor-faktor Perubahan Dinamika Masyarakat

Perubahan dinamika masyarakat dapat terjadi karena beberapa factor (Salam, 2002) antara lain:

- a. Penyebaran informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan (pemikiran).
- b. Teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Modal, antara lain sumber daya manusia ataupun modal finansial .
- d. Ideologi atau agama, keyakinan agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial.
- e. Birokrasi, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya.
- f. Agen atau aktor, hal ini secara umum termasuk dalam modal sumber daya manusia, tetapi secara spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam “mencari” kehidupan yang lebih baik.

4. Masyarakat Sebagai Tempat Sosialisasi

Manusia sebagai anggota masyarakat terikat oleh sebuah aturan yang berlaku didalam masyarakatnya. Aturan tersebut diwujudkan dalam bentuk norma dan nilai yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan, kebiasaan, kepercayaan, kesenian, bahasa serta tata kelakuan yang berbeda antara masyarakat disuatu daerah dengan daerah lainnya. Dengan adanya norma dan nilai tersebut kehidupan masyarakat akan menjadi teratur dan terkendali sehingga terciptalah kondisi yang kondusif dalam melangsungkan hidupnya. Norma dan nilai pada suatu masyarakat bentuknya berupa tradisi yang turun menurun yang bahkan kadang dalam bentuk yang tidak tertulis. Namun masyarakat yang memiliki norma tersebut senantiasa menjaganya penerus mereka, baik dalam kepercayaan, kesenian, bahasa atau dalam bentuk lainnya.

Melalui proses sosialisasi seseorang atau sekelompok orang menjadi mengetahui dan memahami bagaimana ia atau mereka harus bertingkah laku di lingkungan masyarakatnya, juga mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan peranan-peranan yang dimilikinya (Tejokusumo, 2014).

5. Syarat-syarat Masyarakat

Masyarakat harus mempunyai syarat-syarat (Abu Ahmadi Sani, 2007: 32) sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

C. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik menjadi fenomena paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika perubahan sosial-politik (Kornblurn, 2003: 294).

Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dan kenyataan apa yang diharapkan. Menurut Gibson (1977: 347) hubungan selain dapat menciptakan kerja sama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri, dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Pruitt dan Rubin mendefinisikan dengan mengutip Webster bahwa “konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan” (Pruitt dan Rubin, 2004: 10).

1. Teori Konflik Dahrendorf

Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan yang lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Teori konflik Ralf Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2005: 152).

Dasar pemikiran Ralf Dahrendorf atas teori ini adalah mengasumsikan bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2005: 153).

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah yakni konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik diektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsensus (Ritzer dan Goodman, 2005: 154). Teori konflik harus menguji

konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi “otoritas” selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan otoritas dan konflik sosial Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe yaitu:

a. Kelompok Semu (*quasi group*)

Adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, tetapi belum menyadari keberadaannya.

b. Kelompok Kepentingan (*manifes*)

c. Kelompok Konflik

Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Mereka dipersatukan oleh keentingan yang sama. Dahrendorf menawarkan suatu variabel penting yang mempengaruhi derajat kekerasan dalam konflik kelas/kelompok ialah tingkat di mana konflik itu diterima secara eksplisit dan diatur (Ritzer dan Goodman, 2005: 156).

2. Jenis-jenis Konflik

Menurut James A.F. Stoner dan Cacharles Wirawan (2010: 22) dikenal ada lima jenis konflik, sebagai berikut:

- a. Konflik intrapersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi apabila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin di penuhi sekaligus.
- b. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antar dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain.
- c. Konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas, yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktifitas kelompok di mana ia berada.

- d. Konflik antarkelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi didalam organisasi-organisasi. Konflik antara lini dan staf, pekerja dan pekerja.
- e. Konflik antara organisasi contohnya, seperti di bidang ekonomi di mana Amerika Serikat dan Negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasa disebut persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya manusia secara lebih efisien.

Konflik dapat dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik yang berkonflik, (Wirawan; 2010: 116) yaitu:

(1) Konflik vertical

Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elite yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertical adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

(2) Konflik Horizontal

Konflik terjadi dikalangan massa atau di rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relative derajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.

3. Ciri-ciri dan Tahapan Terjadinya Konflik

Menurut Wiyono (1993: 37) ciri-ciri konflik adalah

- a. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
- b. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan.
- c. Munculnya interaksi dan gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab pemenuhan berbagai macam bentuk fisik, sandang pangan, materi dan kesejateraan atau pemenuhan kebutan sosio-psikologis seperti rasa aman, kepercayaan diri kasih, penghargaan dan aktualisasi diri.
- d. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang larut-larut.
- e. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, pretisi dan sebagainya.

Tahapan-tahapan perkembangan kearah terjadinya konflik adalah sebagai berikut:

- a. Konflik masih tersembunyi (*laten*) berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak di persoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya.
 - b. Konflik yang mendahului (*antecedent condition*) tahap perubahan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya. Kelompok atau organisasi secara keseluruhan, seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda, perbedaan peran dan sebagainya.
 - c. Konflik yang dapat diamati (*perceived conflicts*).
4. Faktor Penyebab Konflik

Sosiologi memandang bahwa masyarakat itu selalu dalam perubahan dan setiap elemen dalam masyarakat selalu memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Contohnya kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya yang kemudian akan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat (Fisher Simon *dkk*, 2006).

Faktor-faktor penyebab konflik menurut Soejono Soekanto (2006), antara lain yaitu:

- a. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini akan menjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani

hubungan sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya.

- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-Pribadi yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- c. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok, individu memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- d. Faktor-faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri.

Selain itu, menurut Diana Francis (2006), Sebab-sebab terjadinya konflik antara lain:

a. Komunikasi

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.

b. Struktur

Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

c. Pribadi

Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

5. Akibat Konflik

Konflik atau pertentangan tentu saja mempunyai dampak positif maupun dampak negative. Apakah suatu pertentangan membawa dampak-dampak yang positif atau tidak, tergantung dari persoalan yang dipertentangkan dan juga struktur sosial di mana pertentangan tersebut bersifat positif oleh karena itu ia mempunyai kecenderungan untuk memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma atau hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok.

Pemikiran awal tentang fungsi dari konflik sosial berasal dari pemikiran George Simmel yang diperluas oleh Lewis Alfred Coser dalam Furkan Abdi

(2009), yang menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dapat memperbaiki perpaduan integrasi.

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain (Wirawan, 2010):

a. Bertambahnya solidaritas *in-group*

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga atau kelompok biasanya akan tambah erat.

b. Hancurnya atau retaknya suatu kelompok hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok.

c. Adanya perubahan keperibadian individu ketika terjadinya pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental.

d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa raga manusia.

e. Akomodasi, dominasi dan takhluknya suatu pihak konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

6. Manajemen Konflik

Ketika menghadapi situasi konflik, orang berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Perilaku mereka membentuk satu pola atau beberapa pola

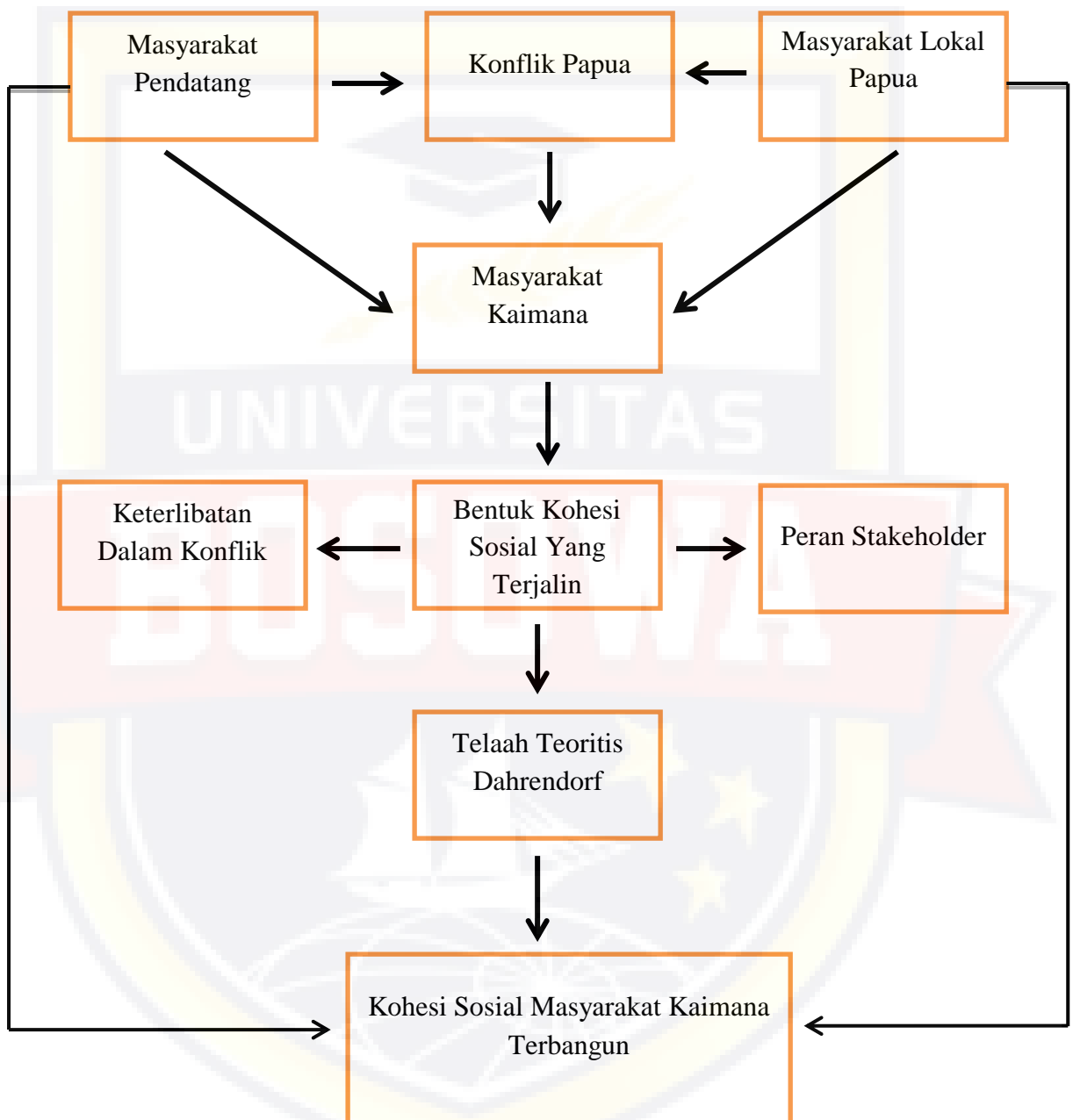
tertentu. Pola perilaku orang-orang dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik (Wirawan, 2010: 134).

- a. Koersi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lebih lemah. Misalnya, sistem pemerintahan totalitarian.
- b. Kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Misalnya, perjanjian gencatan senjata antar dua negara.
- c. Arbitrasi, yaitu terjadi apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Misalnya, penyelesaian pertentangan antara karyawan dan pengusaha dengan serikat buruh, serta departemen tenaga kerja sebagai pihak ketiga.
- d. Mediasi, seperti arbitrasi namun pihak ketiga hanya penengah atau juru damai. Misalnya, mediasi pemerintah RI untuk mendamaikan fraksi-fraksi yang berselisih di Kamboja.
- e. Konsiliasih, merupakan upaya mempertemuakn keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Misalnya, panitia tetap menyelesaikan masalah ketenagakerjaan mengundang perusahaan dan wakil karyawan untuk menyelesaikan pemogokan.
- f. Toleransi, yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang resmi.

- g. Stalemate, terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang. Kemudian keduanya sadar untuk mengakhiri pertentangan. Misalnya, persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur.
- h. Ajudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pengadilan. Misalnya, persengketaan tanah warisan keluarga yang diselesaikan di pengadilan (Soekanto ; 1999: 84).



D. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukan lah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif (Gunawan, 2007).

Menurut Sugiyono (2012: 1), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode kualitatif dimaksudkan dalam penelitian ini adalah agar dapat mendeskripsikan secara obyektif realitas tentang “Kohesi Sosial Masyarakat di tengah konflik Papua di Kota Kaimana provinsi Papua Barat”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kaimana provinsi Papua Barat sebagai fokus penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan di bulan desember 2019 sampai dengan bulan januari 2020. Tetapi batas waktu tersebut masih bersifat sementara, sehingga jika sewaktu-waktu masih memerlukan data, penulis dapat mengunjungi lokasi penelitian.

C. Subjek Penelitian

Metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive Sampling*. "Purposive sampling menurut Sugiyono (2016: 82) teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu."

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang di teliti. Oleh karena itu ,penulis memilih *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang di gunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan yang digunakan, yaitu informan kunci dan informan biasa. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Kaimana, pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, sedangkan yang menjadi informan biasa adalah instansi-instansi terkait

seperti, polres Kabupaten Kaimana, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaimana, dan lain-lain.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan observasi, di mana wawancara akan dilakukan masyarakat Kaimana.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau informasi yang diperoleh dari pemerintah setempat dan Polres Kabupaten Kaimana. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, meliputi arsip-arsip atau data-data terkait penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena sosial yang muncul mengenai konflik Papua, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data

tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama penelitian untuk mengoptimalkan data mengenai ‘Koehsi Sosial Masyarakat di tengah konflik Papua di Kota Kaimana Provinsi Papua Barat’.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam mengenai koehsi sosial masyarakat Kabupaten Kaimana di tengah konflik Papua. Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden, yaitu dengan wawancara, observasi, analisis dokumen, dan foto-foto kegiatan yang ada.

2. Reduksi Data

Dalam reduksi data, data yang diperoleh disortir karena data dari hasil wawancara merupakan data yang memiliki sifat sangat luas informasinya bahkan masih mentah. Dengan ini kita akan bisa memilih laporan hasil wawancara yang lebih penting, jadi bila ada hasil laporan yang dirasa kurang penting bisa dibuang.

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melakukan editing, pengelompokkan, dan meringkas data. Tahap *kedua*, menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal berkaitan dengan data yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menentukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Pada tahap terakhir dari reduksi data adalah menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok yang bersangkutan.

3. Pengajian Data

Hasil dari pengorganisasian data yang disajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam sebuah laporan. Bentuk penyajian laporan berupa diskriptif analitik dan logis yang mengarah pada kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap data dalam wawancara.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menyangkut intepretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan objektivinya terjamin. Kesimpulan bisa berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti saat mengadakan pencatatan atau bisa berupa suatu tinjauan ulang terhadap catatan-catatan di lapangan.

G. Teknik Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu membandingkan data yang diperoleh dalam wawancara dengan data observasi, artinya adalah membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

2. Perpanjangan Pengamat

Maksud perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan, hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

3. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

H. Operasionalisasi Konsep

Operasional konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Kohesi sosial yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anggotanya termasuk dengan pemenuhan kebutuhan hidup di dalamnya.
2. Masyarakat Kaimana yang dimaksud adalah masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan di Kota Kaimana.
3. Konflik, yang dimaksud adalah pertikaian antara masyarakat sebagai upaya menentang ujaran kebencian kepada mahasiswa yang terjadi di asrama mahasiswa Papua yang beralamat Jln.Kemasan III Surabaya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kaimana

Secara astronomis, Kabupaten Kaimana terletak antara 020,90'-040,20' Lintang Selatan dan 1320,75'-1350,15' Bujur Timur, tepat berada di bawah garis katulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kaimana memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama
2. Sebelah selatan : Laut Arafura
3. Sebelah barat : Kabupaten Fak-fak
4. Sebelah timur : Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika

Kabupaten Kaimana merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-100 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi antara 020,90' – 040,20' Lintang Selatan dan 1320,75'-1350,15' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kaimana mencapai 36.000 km², yang terdiri atas luas daratan mencapai 18.500 km² habis dibagi menjadi 7 distrik, 2 kelurahan, dan 84 kampung/ desa. Luas lautan/ perairan kurang lebih 17.500 km². Secara umum, kampung-kampung di Kabupaten Kaimana terletak di pesisir laut. Sebanyak 63,95% kampung yang termasuk daerah pesisir, 5,81% kampung berada di puncak, 13,96% berada di lereng/ punggung bukit, 4,65% merupakan daerah yang terletak di lembah DAS, dan sisanya sebanyak 11,63% berada di dataran (Kaimana dalam angka, 2015).

B. Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Kabupaten Kaimana terdiri dari 7 wilayah distrik dengan luas daratan masing-masing distrik yaitu:

1. Buruway (2.650 km²)
2. Teluk Arguni Atas (3.010 km²)
3. Teluk Arguni Bawah (1.990 km²)
4. Kaimana (2.095 km²)
5. Kambrau (755 km²)
6. Teluk Etna (4.195 km²)
7. Yamor (3.805 km²)

Kabupaten Kaimana sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Fak-Fak. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kaimana dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Pemerintah daerah Kabupaten Kaimana memiliki 7 distrik dengan 2 kelurahan serta 84 kampung. Dilihat dari komposisi jumlah kampung/ kelurahan, Distrik Teluk Arguni Atas yang memiliki jumlah kampung/ kelurahan terbanyak yaitu 24 kampung. Distrik Teluk Etna memiliki jumlah kampung/ kelurahan paling sedikit yaitu 5 kampung. Sebagai salah satu kabupaten yang masih terbilang baru di Papua Barat. Kabupaten Kaimana berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten

Wondama (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 4245). Luas wilayah darat dan laut Kabupaten Kaimana adalah 36.000 km², terdiri atas luas daratan mencapai 18.500 km² dan luas laut 17.500 km². Secara morfologi Kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar hingga berbukitbukit dan bahkan bergunung dengan kemiringan lereng bervariasi mulai 40% dan setempat bisa mencapai 70%. Ketinggian tempat 100-2.800 m dpl. Daerah seperti ini tersebar luas di bagian utara merupakan Gunung Wagura Kote dan sebelah barat merupakan pegunungan Kumawa dengan luas areal 14.415,8 Km² (77,92%). Wilayah Kabupaten Kaimana sebagian besar berada pada kemiringan lereng > 40%.

C. Kondisi Sosial Ekonomi di Kaimana

Secara umum kondisi sosial ekonomi penduduk asli di Kabupaten Kaimana saat ini masih bersifat tradisional yaitu sebagai petani dan nelayan. Hasil produksi dari petani dan nelayan umumnya hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara terbatas. Sebagian penduduk lainnya menekuni lapangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Buruh bangunan dan pelabuhan serta sektor lainnya. Tiga wilayah Kabupaten Kaimana yang merupakan wilayah pesisir dan mudah diakses, membuat banyak sekali para pedagang dan pengusaha yang berdatangan dan membuka usahanya di Kaimana.

Hal ini tentu sangat membantu masyarakat di Kaimana untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Umumnya dunia usaha dan perdagangan ditekuni oleh penduduk asal bugis, jawa dan lain sebagainya. Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten telah banyak menerapkan program-program di bidang pendidikan. Hal

ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM di Kaimana agar mampu bersaing serta mencukupi kebutuhan ekonominya.

D. Adat Istiadat di Kabupaten Kaimana

Letak Kabupaten Kaimana yang strategis sebagai tempat persinggahan membuat adat istiadat di Kaimana mendapat pengaruh budaya luar. Hal inilah yang menyebabkan nilai-nilai adat asli Kaimana telah terakulturasi oleh nilai-nilai budaya sekitar. Penduduk yang bermukim di daerah pegunungan dan pedalaman belum banyak dipengaruhi oleh interaksi dari luar, sedangkan penduduk daerah pesisir telah banyak mendapat pengaruh tersebut melalui perkawinan, seni musik atau tari maupun cara berbusana.

Penduduk distrik Kaimana kota sebagian besar tinggal pada daerah kampung-kampung. Penduduk Distrik Kaimana yang merupakan suku-suku lokal adalah penduduk terbesar. Setelah itu disusul oleh penduduk non pribumi yang tersebar di beberapa kampung di wilayah kelurahan Kaimana kota, seperti kampung Seram dan kaki air. Penduduk non pribumi di dua kampung ini merupakan migrasi penduduk dari daerah Maluku dan Sulawesi Selatan serta pulau Jawa. Penduduk suku asli Kaimana terdapat di daerah kampung-kampung di dalam dan di luar kelurahan Kaimana kota. Suku-suku asli ini di antaranya suku Irarutu, Mairasi, Kambarau dan Koiwai. Persebaran suku Irarutu terdapat di daerah selatan kelurahan Kaimana kota. Suku ini berasal dari distrik teluk Arguni. Suku Mairasi berasal dari pedalaman bagian timur Kaimana dan tersebar di pesisir pantai utara, dan timur distrik Kaimana. Suku Kambarau berasal dari distrik teluk

Kambrau. Suku Koiwai berasal dari daerah barat distrik Buruway dan daerah utara distrik Kaimana. Suku ini hampir sebagian besar mendiami daerah-daerah kepulauan. Multikulturistik sangatlah kental dengan masyarakat di pesisir selatan tanah Papua ini. Kaimana memiliki kekayaan dan ragam warisan budaya yang melibatkan masyarakat adat melanesia (suku asli) sebagai pemukim pada masa yang mengelilingi bagian Indonesia dan juga dari wilayah jauh seperti Timur Tengah pada masa perdagangan rempah-rempah dulu.

Pernyataan ini tercermin dari pola penyebaran agama Islam dan Kristen di Kaimana. Proses ajaran agama merubah wajah sebagian masyarakat asli Kaimana. Agama Islam maupun Kristen menambah keragaman masyarakat asli Kaimana. Sebagian masyarakat asli Papua yang beragama Islam dan Kristen menunjukkan adanya pemukim lama yang memperkenalkan agama dalam kehidupan masyarakat asli Kaimana sejak masa silam. Masuknya pemukim pada masa lalu membawa agama bagi masyarakat asli Kaimana dan perlahan-lahan meninggalkan sistem kepercayaan yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Meskipun demikian nilai-nilai dan sistem kepercayaan sebagian masih melekat dalam kehidupan mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lalu.

Berdasarkan hasil kajian sosial ekonomi antara Universitas Papua dan Pemda Kaimana (2011) masyarakat asli Kaimana terdiri atas sembilan (9) suku yaitu sebagai berikut:

1. Suku Baham meliputi Kampung Sanggrum dan Weri, Fak-fak.

2. Suku Irarutu meliputi kampung Fruata, Naramas, Wagura, Afuafau, Gusimawa, Boywer, Maniva, dan Bagura.
3. Suku Kambrau meliputi kampung Inan, Wanoma, Ubia, Seramku, Kukasa, Tanggaromi, Coa dan Kooy.
4. Suku Mairasi meliputi Kampung Barari, Morano, Maimai, Lobo dan Sisir.
5. Suku Buruway meliputi Kampung Guriasa, Hia dan Yarona.
6. Suku Koiway meliputi Kaimana Kota, Namatota, dan Kampung Adijaya.
7. Suku Semimi adakah meliuti kampung kayu merah, dasn berbatasan dengan suku Kamoro di Kampung Nenasa Timika.
8. Suku Karas meliputi Pulau Karas.
9. Suku Uruangniri meliputi pulau-pulau kecil di belakang pulau Karas, yaitu kampung Tumbawaga.

Semua suku di atas saat ini tersebar di wilayah distrik dan Kota Kaimana, namun beberapa kampung masih didominasi oleh suku tertentu dan menjadi pusat kebudayaan masyarakat adat suku tertentu. Setiap suku terdiri atas marga yang memiliki wilayah ulayatatau petuanan sebagai wilayah pengaruh dengan kekuasaan mereka. Masing-masing marga memiliki wilayah yang sampai saat ini terlembagakan di antara masyarakat secara non formal. Setiap petuanan saling menghargai dan bisa menikmati hasil bumi yang ada didalamnya. Pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam suatu wilayah petuanan harus seizin dan sepengetahuan pemilik petuanan. Secara formal masyarakat adat terwadahi dalam kelembagaan yang meliputi seluruh masyarakat adat atau suku dalam suatu wilayah administrasi. Setiap kota di Papua memiliki sebuah lembaga yang secara

formal diakui oleh pemerintah setempat. Kaimana memiliki lembaga adat yang diberi kepercayaan untuk mengatur semua suku yang ada di Kaimana. Demi mewujudkan keharmonisan dan kerukunan dalam berkehidupan antara satu suku dengan suku yang lain di daerah Kaimana, dibentuklah lembaga adat yang dimaksudkan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan nilai-nilai adat. Hal ini diharapkan bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara masyarakat hukum adat. Sesuai dengan fungsinya maka, lembaga adat diharapkan mampu menegakan hukum adat secara baik dan benar guna mewujudkan masyarakat yang taat pada nilai-nilai leluhur.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan

Berdasarkan judul penelitian, penulis melibatkan informan yaitu para stakeholder, satuan keamanan dan masyarakat Kabupaten Kaimana yang terikat oleh suatu sistem nilai budaya dan adat istiadat. Antara manusia atau anggota masyarakat terjalin kohesi sosial yang ditandai dengan adanya kekeratan sosial yang saling berpengaruh. Perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya (Mubyarto dkk, 1993).

TABEL I
PROFIL INFORMAN

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Onesimus Safuf S.IP	PNS	30 Tahun
2	Frengki Furimbe	Pegawai Kontrak	38 Tahun
3	Anselmus Kopong	Wiraswasta	53 Tahun
4	Emilianus	Petani	35 Tahun
5	Romarius Surbay	Pegawai Kontrak	28 Tahun
6	Ismail Sirfefa S.sos., M.H	Wakil Bupati	65 Tahun
7	Ferdinan Mardi SIK	Polisi	48 Tahun

B. Hasil Penelitian

Sebagai upaya pengumpulan informasi data yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian lapangan ini melalui beberapa tahapan, antara lain: observasi, wawancara, indepth interview dan focus group diskusi. Adapun hasil penelitian ini dirangkum dalam pengelompokan informasi data sebagaimana table hasil wawancara sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Kaimana tidak terimbas konflik Papua?

Tabel II

Hasil Wawancara dan Pemaknaan

No	Nama Responden	Hasil Wawancara	Pemaknaan
A. Pemerataan Peran Masyarakat			
1	Onesimus	Peluang kerja itu ada ketika ada kursi yang dibutuhkan dan itu terbuka kepada siapa saja yang mempunyai keterampilan dalam bidang-bidang tersebut.	Peluang kerja terbuka, semua masyarakat dapat mengakses sesuai keterampilannya.
2	Frengki	Mengenai kesempatan kerja antara OAP dan non OAP saya kira itu sudah ada peraturannya di mana persen besarnya adalah masyarakat asli, namun jika posisi tersebut atau bidang	Ada aturan yang memprioritaskan kebutuhan kerja bagi orang Papua dari pada pendatang.

		tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat asli, maka masyarakat pendatang boleh mengisinya.	
3	Anselmus	Kesempatan dalam memperoleh pendidikan di kabupaten Kaiman sangat terbuka bagi masyarakat Kaimana entah pendatang maupun masyarakat asli Papua. Dan saya sangat bersyukur karena ada aturan dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.	Kesempatan memperoleh pendidikan terbuka kepada siapa saja bahkan pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan.
4	Emilianus	Dalam menjaga keharmonisan saya pikir saya pikir masyarakat sudah paham dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kaimana di mana terdapat berbagai suku-suku agama ini sudah terjalin sejak lama sehingga keterlibatan masyarakat dalam menjaga	Dalam menjaga keharmonisan sudah ada pemahaman tersendiri dari masyarakat dan keharmonisan dalam bermasyarakat telah terjalin sejak lama.

		keharmonisan itu sangat kuat dilakukan oleh masyarakat.	
5	Romarius	Terlihat jelas di Kabupaten Kaimana andil masyarakat dalam menjaga keharmonisan cukup tinggi seperti sopan santun terhadap yang berbeda keyakinan, saling menghormati, saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai yang ada di Kabupaten Kaimana.	Dalam menjaga keharmonisan masyarakat Menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dengan saling menjaga sikap sopan santun dan saling menghargai.
6	Ismail	Yang kami presentasikan pekerjaan dalam pemerintahan 40% bagi yang dari luar Papua dan 60% untuk asli Kaimana. Untuk nmenyikapi kebijakan MENPAN penerimaan pegawai itu lansung di tentukan 80% OAP dan 20% Non OAP.Namun sejauh ini kami belum ada peneranpan seperti itu, tetapi justru mereka yang datang dari luar apabila ada formasi-formasi	Sesuai kebijakan MENPAN penerimaan pegawai adalah 80% OAP dan 20% non OAP. Namun jika formasi yang dibutuhkan tidak dimiliki oleh OAP maka masyarakat pendatang dapat mengisi jabatan yang dibutuhkan berdasarkan

		yang diminta dan diharapkan tapi orang asli Papua yang tidak punya ijazah atau sertifikasi dalam suatu bidang misalkan guru atau dokter, tidak menutup kemungkinan saudara dari luar Papua yang unggul dalam bidang itu mempunyai kesempatan mengisi jabatan itu dan berkompetisi atau ikut melamar.	bidangnya.
B. Perilaku Dan Kesadaran Masyarakat			
1	Onesimus	Selama ini belum pernah ada persoalan antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Ini menandakan bahwa hubungan antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang terjalin dengan baik.	Belum pernah ada masalah antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang sehingga menandai bahwa kehidupan bermasyarakat terjalin dengan baik.
2	Frengki	Masyarakat Kaimana menanggapi isu tersebut dengan sangat selektif dan mengedepankan rasa toleransi	Masyarakat selektif dalam menanggapi isu dengan lebih mengutamakan rasa

		<p>kekeluargaan yang tinggi sehingga aksi demo damai yang berlangsung sangat kondusif tanpa ada yang terprovokasi. Situasi seperti inilah yang saya harapkan untuk terus kita jaga, ketika ada masalah kita terus berpegangan tangan.</p>	<p>kekeluargaan sehingga situasi sangat kondusif</p>
3	Anselmus	<p>Kalau untuk saya sebagai pendatang saya tidak terlalu menanggapi masalah itu. kalau untuk masyarakat asli memang sangat kecewa dengan masalah ujaran kebencian itu sehingga mereka menanggapi juga dengan demo, tetapi hanya dengan demo damai saja.</p>	<p>Aksi demo damai yang di gelar merupakan wujud kekecewaan dalam menanggapi isu rasisme.</p>
4	Emilianus	<p>Rasa kecewa sekaligus sedih yang di rasakan oleh masyarakat kaimana terkait rasisme saya sangat apresiasi terhadap masyarakat kaimana karena merespon isu rasisme itu dengan</p>	<p>Masyarakat merespon isu rasisme masyarakat Kaimana menggelar aksi demo damai. Dalam aksi demo damai, masyarakat</p>

		aksi damai dan saya mendukung itu selama menyampaikan aspirasi mereka dengan aman.	menyampaikan aspirasi mereka.
5	Romarius	Menurut saya ikatan persudaran itu masih terjaga dan masih tertanam dalam benak masyarakat asli maupun pendatang. Walaupun terkadang hubungan seketika renggang karena persoalan mabuk berujung perkelahian namun tidak berefek besar karena dari pihak masing keluarga mengambil sikap dengan jalan damai. Jadi menurut saya hubungan kami baik-baik saja kami saling menerima kekurangan dan kelebihan kami.	Ikatan persaudaraan masih tetap terjaga meskipun terkadang ada masalah-masalah kecil namun tetap teratasi dengan jalan damai.
C. Intregasi Sosial			
1	Frengki	Ya. Contohnya dalam hidup beragama masyarakat Kaimana selalu membudayakan untuk ikut berpartisipasi dalam acara-acara	Toleransi antara umat beragama, pada masyarakat Kaimana sangat baik. Adanya

		keagamaan seperti ketika saudara dari umat muslim merayakan hari kebesaran maka yang yang menjaga keamanan adalah saudara dari non muslim dan begitupun sebaliknya.	kerjasama antar umat dalam setiap hari besar keagamaan.
--	--	---	---

Berdasarkan hasil triangulasi data, maka hasil wawancara terkait keadaan dari ketiga sub indikator pengamatan, dapat dimaknai sebagaimana penyajian data di atas.

2. Bentuk-bentuk Kohesi Sosial

Bentuk kohesi sosial yang terdapat pada masyarakat Kaimana, dapat dilihat dalam tabel hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel III
Hasil Wawancara Dan Pemaknaan

No	Nama Responden	Hasil Wawancara	Pemaknaan
1	Onesimus	Bersatu dan kompak untuk melakukan tindakan aksi demo damai dan pernyataan sikap tanpa menimbulkan kericuhan.	Persatuan dan kekompakan dalam mengambil tindakan.
2	Frengki	Rasa persaudaraan di Kabupaten Kaimana tergambar jelas dengan	Adanya sikap rasa persaudaraan yang

		tingkat kesolidaritas yang tinggi dari segenap masyarakat, di mana aksi solidaritas dalam menanggapi isu konflik Papua dilakukan dan diikuti oleh orang asli Papua maupun suku-suku pendatang yang ada.	tinggi, terlihat jelas dengan adanya tingkat kesolidaritas dari segenap masyarakat dalam menanggapi isu konflik Papua.
3	Anselmus	Menurut saya mungkin sikap saling menghargai dan menghormati antara masyarakat kaimana yang di tanamkan sejak dulu sehingga kami tidak terprovokasi dengan masalah itu dan ini berkat kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Kaimana.	Sikap toleransi dan saling menghargai menjadi sumber masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu rasisme yang terjadi.
4	Emilianus	Karena terlalu kuat rasa persaudaraan antara masyarakat kaimana dan kami lebih percaya bahwa untuk kemajuan kaimana kami tidak boleh membuat sesuatu yang dapat menimbulkan keresahan terhadap	Demi kemajuan Kabupaten Kaimana, masyarakat sadar untuk tidak menimbulkan keresahan yang dapat memecah

	masyarakat kaimana.	belah persatuan.
--	---------------------	------------------

Berdasarkan hasil triangulasi data, maka hasil wawancara terkait keadaan dari sub indikator pengamatan, dapat dimaknai sebagaimana penyajian data di atas.

- Peran stakeholder dalam menjaga Kohesi Sosial Di Tengah Konflik Papua guna mengetahui peran stakeholder dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Kaimana disaat terjadinya Konflik Papua, dapat dilihat dalam sajian table sebagai berikut:

Tabel IV
Hasil Wawancara Dan Pemaknaan

No	Nama Responden	Hasil Wawancara	Pemaknaan
A. Pemerintahan Daerah Kaimana			
1	Ismail Sirfeffa	Sejauh ini dalam kebijakan pemda dan bekerja sama dengan UNIPA kami sudah mengukur tingkat pendapatan masyarakat . Dengan adanya kebijakan keuangan ekonominya membaik dan taraf hidupnya meningkat. Dengan adanya visi	Taraf hidup dan ekonomi masyarakat kaimana meningkat dengan adanya kebijakan keuangan dari pemda, serta merujuk pada visi pembangunan

	<p>pembangunan Kabupaten Kaimana, adalah pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah kesejahteraan. dan itu semua butuh proses tapi saya lihat hari lepas hari perbaikan taraf hidup masyarakat semakin membaik di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.</p>	<p>Kabupaten Kaimana adalah pembangunan berkelanjutan yaitu tentang kesejahteraan</p>
	<p>Sebenarnya dalam kebijakan PEMDA ini tidak membedakan. Semua punya kesempatan yang sama dalam dan layak memperoleh pendidikan. Pendidikan dari SD sampai SMP semua kebutuhan-kebutuhan sekolah Masih di bantu oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kebijakan baru mengenai SMA dan perguruan tinggi tidak lagi menjadi domain kabupaten tetapi provinsi, cuman secara moril dan memikirkan bahwa</p>	<p>Pemda masih masih mempunyai kewajiban dalam membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi</p>

	<p>mereka juga adalalah anak-anak kita, sehingga pemda Kabupaten Kaimana masih membantu bahkan dengan kebijakan bupati terkait dengan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang study di beberapa kota di Indonesia</p>	
	<p>Hubungan pemerintah dengan masyarakat masih familiar pada umumnya. Artinya bahwa masyarakat ini tidak melihat dirinya lagi sebagai objek tetapi subjek pembangun, sehingga terkadang ada forum tertentu yang di adakan oleh FORKOPIMDA, dan menghadirkan masyarakat atau elemen-elemen membangun pikiran bersama untuk mewacanakan sesuatu terkait dengan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan itu sendiri, kemudian tataran lebih lanjut</p>	<p>Masyarakat tidak melihat dirinya sebagai obyek tapi subjek pembangunan sehingga ada forum tertentu yang menghadirkan masyarakat dalam mewacanakan sesuatu terkait kebutuhan masyarakat.</p>

		proses itu berjalan dalam musyawarah bersama masyarakat.	
		Kami melakukan beberapa kegiatan seperti dialog antar tokoh-tokoh agama, adat dan suku-suku yang ada di Kaimana yang dimediasi oleh Kesbangpol dan pihak kepolisian. Hasil dari dialog tersebut, kami menyatakan sikap dan menyatukan pandangan untuk tetap hidup rukun, aman dan damai untuk kemajuan Kabupaten Kaimana. Adapun beberapa kegiatan masyarakat yang selalu kami hadiri setiap akhir dari sambutan kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu hidup aman dan berdampingan.	Melakukan dialog antara masyarakat, tokoh-tokoh agama, adat dan suku-suku yang ada di Kaimana dan di mediasi oleh KESBANGPOL, pihak kepolisian untuk menyatakan sikap dan menyatukan pandangan agar tetap hidup damai untuk kemajuan Kabupaten Kaimana.
B. Aparat Keamanan			
1	Ferdinan	Yang kami lakukan adalah	Melakukan

	Mardi	sosialisasi dan berdiskusi serta menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan isu rasisme dan kami mengagendakan pertemuan antara PEMDA, DPRD, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama serta masyarakat. Hasil dari pertemuan itu adalah kita bersepakat Kota Kaimana jangan terprovokasi dengan isu rasisme sehingga masyarakat Kaimana tetap hidup aman dan damai.	sosialisasi/pertemuan dengan PEMDA, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat (untuk tidak terprovokasi dengan isu rasisme).
--	-------	---	---

Berdasarkan hasil triangulasi data, maka hasil wawancara terkait keadaan dari sub indikator pengamatan, dapat dimaknai sebagaimana penyajian data di atas.

C. Pembahasan

Pembahasan pada bab ini didasarkan pada seluruh data yang berhasil di himpun pada saat penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kaimana. Data yang di maksud dalam hal ini merupakan data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang di pakai untuk keperluan peneliti

dalam menulis karya ilmiah. Fokus informan dalam penelitian saya adalah masyarakat dan stakeholder Kabupaten Kaimana, penulis telah melakukan observasi lokasi penelitian, untuk mengetahui situasi dan kondisi pada tempat tersebut.

Dengan mendeskripsikan data tersebut dapat di peroleh beberapa jawaban yang berkaitan dengan kohesi sosial masyarakat Kaimana di tengah konflik Papua adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Masyarakat Kaimana Tidak Terimbas Konflik Papua?

a. Pemerataan Peran Masyarakat

“Peluang kerja itu ada ketika ada kursi yang dibutuhkan dan itu terbuka kepada siapa saja yang mempunyai keterampilan dalam bidang-bidang tersebut, (Onesimus.30).”

Dari kutipan wawancara tersebut di atas terlihat bahwa Peluang kerja ada dalam lingkup pemerintah oleh karena itu masyarakat Kaimana OAP maupun non OAP yang ingin memperoleh pekerjaan, mempunyai peluang sangat terbuka lebar dan dapat mengakses sesuai keterampilan dan jenjang pendidikannya . Hal ini dapat di lihat dalam penerimaan pegawai kontrak untuk OAP non OAP oleh Pemda Kaimana, sehingga tidak ada kecemburuan sosial yang berlebihan.

“Mengenai kesempatan kerja antara OAP dan non OAP saya kira itu sudah ada peraturannya di mana persen besarnya adalah masyarakat asli, namun jika posisi tersebut atau bidang tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat asli, maka masyarakat pendatang boleh mengisinya, (Frengki Furimbe.38).”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut di atas terlihat bahwa dalam hal ini memang ada aturan yang memprioritaskan kebutuhan kerja bagi orang Papua dari pada pendatang. Namun di sisi lain apabila di suatu bidang tertentu tidak dimiliki oleh OAP maka non OAP boleh mengisinya sehingga peluang dalam memperoleh pekerjaan tidak membedakan antara OAP dan non OAP. Semua punya kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan bahkan Pemda Kaimana memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjadi pengangguran dimana-mana.

“Kesempatan dalam memperoleh pendidikan di kabupaten Kaimana sangat terbuka bagi masyarakat Kaimana entah pendatang maupun masyarakat asli Papua. Dan saya sangat bersyukur karena ada aturan dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi,” (Anselmus Kopong.53).”

Dari hasil kutipan wawancara di atas terlihat bahwa di Kabupaten Kaimana Kesempatan dalam memperoleh pendidikan sangat terbuka bagi masyarakat Kaimana OAP maupun non OAP. Ini tak terlepas dari campur tangan PEMDA Kaimana lewat kebijakan dalam memberi bantuan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya sehingga masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan pendidikan lewat kebijakan Pemda dan mempunyai kesempatan yang sama OAP dan non OAP.

“Dalam menjaga keharmonisan saya pikir masyarakat sudah paham dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kaimana di mana terdapat berbagai suku-suku agama ini sudah terjalin sejak lama sehingga keterlibatan masyarakat dalam menjaga keharmonisan itu sangat kuat dilakukan oleh masyarakat,” (Emilianus.35).”

Berdasarkan narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa keharmonisan masyarakat kaimana telah terjalin sejak lama, di mana ada berbagai suku, agama, ras, dll yang berdomisili di Kabupaten Kaimana. Sikap saling menghargai dan saling mengormati serta menjunjung toleransi terhadap perbedaan keyakinan itu sangat kuat dan tertanam dalam benak setiap masyarakat Kaimana. Sehingga sampai sekarang ini masyarakat OAP maupun non OAP di Kaimana masih mempertahankan dan menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat.

“Terlihat jelas di Kabupaten Kaimana andil masyarakat dalam menjaga keharmonisan cukup tinggi seperti sopan santun terhadap yang berbeda keyakinan, saling menghormati, saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai yang ada di Kabupaten Kaimana, (Romarius Surbay,28).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa dalam menjaga keharmonisan, masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dengan saling menjaga sikap sopan santun dan saling menghargai. Hal ini terlihat jelas pada hari-hari besar Agama di mana ada silaturahmi antara sesama masyarakat Kaimana yang berbeda keyakinan dan kebiasaan masyarakat kaimana dalam menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai dan secara kekeluargaan. Ini yang di tanamkan sejak dari nenek moyang terdahulu sehingga tetap menjaga apa yang kemudian di wariskan oleh nenek moyang.

“Yang kami presentasikan pekerjaan dalam pemerintahan 40% bagi yang dari luar papua dan 60% untuk asli Kaimana. Untuk nmenyikapi kebijakan MENPAN penerimaan pegawai itu lansung di tentukan 80% OAP dan 20% Non OAP. Namun sejauh ini kami belum ada peneranpan seperti itu, tetapi justru mereka yang datang dari luar apabila ada formasi-formasi yang diminta dan

diharapkan tapi orang asli papua yang tidak punya ijazah atau sertifikasi dalam suatu bidang misalkan guru atau dokter, tidak menutup kemungkinan saudara dari luar papua yang unggul dalam bidang itu mempunyai kesempatan mengisi jabatan itu dan berkompetisi atau ikut melamar, (Ismail Sirfeffa.60).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa sesuai kebijakan Menpan penerimaan pegawai adalah 80% OAP dan 20% non OAP. Namun jika formasi yang dibutuhkan tidak dimiliki oleh OAP maka masyarakat pendatang dapat mengisi jabatan yang dibutuhkan berdasarkan bidangnya. Hal ini terlihat jelas bahwa ada penerimaan PNS maupun pegawai kontrak lingkup pemerintahan tidak membedakan antara OAP maupun non OAP, walaupun lebih di prioritaskan putra-putri asli papua sehingga tidak adanya kecemburuan sosial yang terjadi.

b. Perilaku dan Kesadaran Masyarakat

“Selama ini belum pernah ada persoalan antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Ini menandakan bahwa hubungan antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang terjalin dengan baik, (Onesimus Safuf .30).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa sejauh ini Belum ada masalah antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang di Kabupaten Kaimana, walaupun ada sedikit salah paham antara masyarakat namun cepat di tanggapi dan di urus secara kekeluargaan sehingga tidak menjadi masalah besar yang dapat merugikan banyak orang. Hal ini menandakan bahwa keharmonisan masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati masih tertanam dalam benak masyarakat Kaimana. Dan untuk mewujudkan Kaimana yang aman dan tentram masyarakat sudah

seharusnya menjaga sikap dan menghormati sesama masyarakat yang ada di kabupaten Kaimana.

“Masyarakat Kaimana menanggapi isu tersebut dengan sangat selektif dan mengedepankan rasa toleransi kekeluargaan yang tinggi sehingga aksi demo damai yang berlangsung sangat kondusif tanpa ada yang terprovokasi. Situasi seperti inilah yang saya harapkan untuk terus kita jaga, ketika ada masalah kita terus berpegangan tangan, “(Frengki Furimbe.38).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa dalam merespon isu rasisme masyarakat Kaimana menggelar aksi damai di beberapa titik lokasi dalam aksi tersebut tidak ada tindakan yang menimbulkan kerusuhan, hal ini jelas terlihat saat aksi merespon isu rasisme, dalam pelaksanaan aksi berjalan dengan aman, dan lebih mengedepankan rasa saling menghargai antara masyarakat Kaimana sehingga aksipun berjalan dengan kondusif, dan jelas bahwa masyarakat Kaimana masih menjaga nilai, norma yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu rasa memiliki dan menganggap antara sesama masyarakat bagian dari suatu kesatuan yang ingin memajukan kabupaten Kaimana.

“Kalau untuk saya sebagai pendatang saya tidak terlalu menanggapi masalah itu. kalau untuk masyarakat asli memang sangat kecewa dengan masalah ujaran kebencian itu sehingga mereka menanggapi juga dengan demo, tetapi hanya dengan demo damai saja, (Anselmus Kopong .53).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa sebagian masyarakat pendatang memang tidak merespon terkait ujaran kebencian salah satunya Anselmus Kopong. Dalam penuturannya mengatakan bahwa masyarakat asli Papua memang sangat kecewa dengan masalah ujaran kebencian tersebut sehingga masyarakat Kaimana menggelar aksi demo

damai yang merupakan wujud kekecewaan dalam menanggapi isu rasisme, hal ini dapat di lihat dari aksi damai masyarakat Kaimana. Dan terlihat jelas bahwa masyarakat pendatang juga kecewa atas perlakuan oknum yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi tidak ikut terlibat dalam aksi, hanya memberikan dukungan terhadap masyarakat yang menggelar aksi damai.

“Rasa kecewa sekaligus sedih yang di rasakan oleh masyarakat kaimana terkait rasisme saya sangat apresiasi terhadap masyarakat kaimana karena merespon isu rasisme itu dengan aksi damai dan saya mendukung itu selama menyampaikan aspirasi mereka dengan aman, (Emilianus.35).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa masyarakat Kaimana merespon isu rasisme dengan menggelar aksi demo damai. Aksi ini juga mendapat dukungan dari masyarakat asli Papua salah satunya adalah Emilianus dalam penuturannya beliau mengatakan bahwa sangat mengapresiasi dan mendukung aksi demo masyarakat selama menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib, hal itu kemudian dapat di lihat dari aksi masyarakat Kaimana yang berjalan dengan kondusif tidak ada gerakan tambahan yang berujung kerusuhan. Sikap seperti ini yang seharusnya di harapkan juga di miliki oleh masyarakat Kaimana sehingga masalah sebesar apapun bisa di selesaikan secara aman dan lebih memikirkan kepentingan banyak orang.

“Menurut saya ikatan persaudaran itu masih terjaga dan masih tertanam dalam benak masyarakat asli maupun pendatang. Walaupun terkadang hubungan seketika renggang karena persoalan mabuk berujung perkelahian namun tidak berefek besar karena dari pihak masing keluarga mengambil sikap dengan jalan damai. Jadi menurut saya hubungan kami baik-baik saja kami

saling menerima kekurangan dan kelebihan kami, (Romarius Surbay.28).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa ikatan persaudaraan sudah terjalin sejak lama antara suku pendatang maupun asli di Kabupaten Kaimana rasa saling memiliki, saling mengormati serta saling menghargai masih tertanam kuat dalam benak masyarakat Kaimana sampai saat ini, meskipun terkadang ada masalah-masalah kecil namun di atasi secara kekeluargaan dengan jalan damai, dapat di lihat bahwa hubungan baik antara masyarakat asli dan pendatang masih kuat sehingga ketika ada suatu isu konflik yang menghampiri, masyarakat tetap memilih hidup bergandengan dengan masyarakat lainnya di Kabupaten Kaimana.

c. Integrasi Sosial

“Ya. Contohnya dalam hidup beragama masyarakat Kaimana selalu membudayakan untuk ikut berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan seperti ketika saudara dari umat muslim merayakan hari kebesaran maka yang menjaga keamanan adalah saudara dari non muslim dan begitupun sebaliknya, (Frenski Furimbe.38).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa toleransi antara umat beragama masih kuat tertanam dalam benak setiap masyarakat Kaimana hingga saat ini, adanya kerjasama antar umat dalam setiap hari besar keagamaan, dan ikut berpartisipasi serta sialturahmi di hari besar keagamaan. Sikap toleransi ini harus di wariskan kegenerasi berikutnya agar kelak mengerti dan paham akan toleransi terhadap perbedaan keyakinan.

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa, antara keenam informan tersebut mempunyai argumentasi yang cenderung sama bahwa dalam kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat asli papua dan non papua di Kabupaten Kaimana mempunyai kesempatan yang sama dan sadar bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan yang tak dapat di pisahkan dalam menjaga hubungan keharmonisan antara masyarakat asli Papua maupun non Papua di Kabupaten Kaimana.

Dari hasil kutipan wawancara di atas penulis meninjau dari Prespektif Ralf Dahrendorf sebagai berikut:

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik sering terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar yang terlibat.

Dahrendorf memandang bahwa konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik maka dari itu, unit analisis konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan masyarakat. Seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran,

kemiskinan, penindasan dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan yang konstruktif maupun destruktif. Bagi Ralf Dahrendorf dalam teori dua wajah consensus dan konflik itu berhubungan secara dialektik. Sebuah masyarakat tidak mungkin mengalami konflik dengan masyarakat lain jika sebelumnya tidak ada consensus. Seperti halnya masyarakat Kaimana tidak ada muncul konflik jika sebelumnya masyarakat kaimana tidak saling mengenal dan hidup bersama. Demikian pula, konflik dapat mengantarkan orang kepada terciptanya hubungan harmonis atau konsensus. Yang ini kita bisa lihat dari beberapa kutipan wawancara di atas bahwa masyarakat Kaimana sejak dari awal sudah mempunyai nilai dan norma yang baik yang artinya mempunyai kesepakatan bahwa harus hidup saling melengkapi walaupun tidak secara tertulis sehingga ketika konflik seperti halnya rasisme di Surabaya mencuat di kabupaten Kaimana di tanggapi dengan menggelar aksi damai kemudian dengan pertemuan antar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Pemda Kaimana dan pihak keamanan sehingga terjadinya konsensus yang mengantar masyarakat Kaimana hidup dalam bingkai keharmonisan.

2. Bentuk-bentuk kohesi sosial

“Bersatu dan kompak untuk melakukan tindakan aksi demo damai dan pernyataan sikap tanpa menimbulkan keributan.” (Onesimus.30).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa solidaritas masyarakat Kaimana sangat kuat ketika isu rasisme muncul, awalnya memang

tidak merespon namun selang satu hari kemudian masyarakat Kaimana bersatu dalam menggelar aksi demo dalam aksi tersebut tidak ada yang menimbulkan kericuhan karena masyarakat Kaimana sudah menyepakati dengan aksi demo damai hal ini sebagai mana dikatakan oleh saudara Onesimus bahwa persatuan dan kekompakan dalam mengambil tindakan, dan soal respon masyarakat sebagai mana kutipan di atas jelas bahwa nilai dan norma serta rasa memiliki antara masyarakat Kaimana masih tetap kuat di setiap benak masyarakat.

“Rasa persaudaraan di Kabupaten Kaimana tergambar jelas dengan tingkat kesolidaritas yang tinggi dari segenap masyarakat, di mana aksi solidaritas dalam menanggapi isu konflik Papua dilakukan dan diikuti oleh orang asli Papua maupun suku-suku pendatang yang ada, (Frengki Furimbe.38).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa rasa memiliki dan saling melengkapi antara sesama masyarakat Kaimana masih sangat kuat hal ini terlihat jelas solidaritas masyarakat Kaimana dalam menanggapi isu rasisme bukan hanya masyarakat asli Papua namun sebagian masyarakat pendatang juga terlibat dalam aksi tersebut hal ini menandakan bahwa tingkat solidaritas masyarakat sangat tinggi.

“Menurut saya mungkin sikap saling menghargai dan menghormati antara masyarakat kaimana yang di tanamkan sejak dulu sehingga kami tidak terprovokasi dengan masalah itu dan ini berkat kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, (Anselmus Kopong.53).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa sikap toleransi dan saling menghargai menjadi sumber masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu rasisme di mana isu ini terdengar di kalangan masyarakat Kaimana namun dalam menanggapi isu ini masyarakat Kaimana menggelar aksi damai dan tidak ada tindakan anarkis dalam aksi damai, karena masyarakat pendatang maupun asli Papua sudah lama hidup saling melengkapi satu sama lain sehingga masyarakat OAP maupun non OAP tidak mau ada perpecahan yang menimbulkan rusaknya

hubungan persaudaraan antara sesama masyarakat yang sudah di wariskan sejak dahulu.

“Karena terlalu kuat rasa persaudaraan antara masyarakat kaimana dan kami lebih percaya bahwa untuk kemajuan kaimana kami tidak boleh membuat sesuatu yang dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat Kaimana, (Emilianus.35).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa rasa persaudaraan yang tinggi telah membawa masyarakat Kaimana menemukan arti dari sikap saling menghargai dan menghormati sesama hal inilah yang membuat masyarakat tidak terprovokasi di situasi isu konflik Papua dan secara sadar masyarakat tidak menginginkan tindakan anarkis yang menimbulkan keresahan dan dapat memecah belah persatuan serta mencoreng nama baik Kabupaten Kaimana. Seperti dalam penuturan dari saudara Emilianus bahwa untuk kemajuan kaimana kami tidak boleh membuat sesuatu yang dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat Kaimana.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bentuk kohesi sosial yang dilakukan adalah dengan cara sikap saling menghargai dan saling menghormati. Masyarakat Kaimana dalam merespon isu rasisme dengan solidaritas yang sangat kuat sehingga menggelar demonstrasi dengan aksi damai serta lebih bijak dan mengedepankan rasa persaudaraan.

Dari hasil kutipan dan kesimpulan wawancara di atas maka penulis meninjau dengan prespektif Ralf Dahrendorf sebagai berikut:

Konflik dan perubahan Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah konflik itu muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang mampu menyebabkan perubahan dalam struktur sosial, tingkatan intensitas tindakan sangat signifikan

dengan hasil perubahan itu sendiri. Semakin hebat tindakan, semakin besar perubahan sosial itu terjadi. Bila konflik itu hebat maka perubahan terjadi bersifat radikal. Ketika kasus ujaran kebencian di Surabaya timbul, berbagai elemen masyarakat menanggapi kasus tersebut. Sehingga, berbagai elemen masyarakat Kaimana menggelar aksi solidaritas terhadap korban ujaran kebencian di Surabaya bahkan mendapat dukungan berskala nasional dan hampir setiap berita di TV maupun media sosial menayangkan kasus ujaran kebencian tersebut. Maka benar bahwa perubahan itu terjadi secara tiba-tiba. Dahendorf juga menyatakan bahwa semakin intensif suatu konflik, maka semakin banyak perubahan struktural dan reorganisasi itu dapat di hasilkan. Dan semakin keras konflik, maka semakin besar tingkat perubahan struktural dan reorganisasi. Hentakan demo dan gerakan sosial berbagai daerah di seluruh Indonesia dan khususnya Kabupaten Kaimana yang secara efektif menentukan pengaruh pemerintah pusat maupun Pemda Kaimana untuk menanggapi isu ujaran kebencian terhadap mahasiswa di Kota Surabaya . Dan peristiwa ini juga mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait pentingnya penegakan hukum dan keadilan

3. Peran Stakholder

“Sejauh ini dalam kebijakan pemda dan bekerja sama dengan UNIPA kami sudah mengukur tingkat pendapatan masyarakat . Dengan adanya kebijakan keuangan ekonominya membaik dan taraf hidupnya meningkat. Dengan adanya visi pembangunan Kabupaten Kaimana, adalah pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah kesejahteraan.dan itu semua butuh proses tapi saya lihat hari lepas hari perbaikan taraf hidup masyarakat semakin membaik di bandingkan tahun-tahun sebelumnya, Ismail Sirfefa S.sos., M.H (65).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa taraf hidup dan ekonomi masyarakat kaimana meningkat dengan adanya kebijakan keuangan dari Pemda, serta merujuk pada visi pembangunan Kabupaten Kaimana adalah pembangunan berkelanjutan yaitu tentang kesejahteraan hal ini menandakan bahwa perhatian Pemda Terhadap kesejahteraan masyarakat Kaimana memang ada sehingga berbagai upaya yang dilakukan Pemda melalui kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kaimana.

“Sebenarnya dalam kebijakan Pemda ini tidak membedakan, semua punya kesempatan yang sama dalam dan layak memperoleh pendidikan. Pendidikan dari SD sampai SMP semua kebutuhan-kebutuhan sekolah masih dibantu oleh pemerintah daerah .kemudian ada kebijakan baru mengenai SMA dan perguruan tinggi tidak lagi menjadi domain kabupaten tetapi provinsi, cuman secara moril dan memikirkan bahwa mereka juga adalalah anak-anak kita, sehingga Pemda Kabupaten Kaimana masih membantu bahkan dengan kebijakan bupati terkait dengan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang studi di beberapa kota di Indonesia.

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa perhatian Pemda Kaimana dalam bidang pendidikan memang sudah menjadi kewajiban di mana soal pendidikan ini adalah hak setiap warga negara dalam menempuh pendidikan dari SD sampai ke perguruan tinggi jadi semua masyarakat kaimana mempunyai hak dalam memperoleh pendidikan tanpa membeda-bedakan , peran Pemda sangat di butuhkan oleh masyarakat melalui kebijakan, Pemda mempunyai kewajiban dalam membantu masyarakat memperoleh pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi. Hal ini di buktikan dengan adanya aturan berkaitan dengan bantuan beasiswa.

“Hubungan pemerintah dengan masyarakat masih familiar pada umumnya. Artinya bahwa masyarakat ini tidak melihat dirinya lagi sebagai objek tetapi subjek pembangun, sehingga terkadang ada forum tertentu yang di adakan oleh FORKOPIMDA, dan menghadirkan masyarakat atau elemen-elemen untuk membangun pikiran bersama untuk mewacanakan sesuatu terkait dengan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan itu sendiri, kemudian tataran lebih lanjut proses itu berjalan dalam musyawarah bersama masyarakat.

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa Pemda Kaimana dan Masyarakat punya andil besar dalam kemajuan Kabupaten Kaimana di mana masyarakat diharapkan melihat dirinya sebagai subjek pembangunan sehingga ada suatu forum yang mempertemukan antara Pemda dan masyarakat Kaimana untuk mewacanakan sesuatu terkait kebutuhan masyarakat serta kritikan atau masukan-masukan mengenai kinerja Pemda dalam hal ini dilakukan melalui musyawarah bersama sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui forum tersebut.

“Kami melakukan beberapa kegiatan seperti dialog antar tokoh-tokoh agama, adat dan suku-suku yang ada di Kaimana yang dimediasi oleh Kesbangpol dan pihak kepolisian. Hasil dari dialog tersebut, kami menyatakan sikap dan menyatukan pandangan untuk tetap hidup rukun, aman dan damai untuk kemajuan Kabupaten Kaimana. Adapun beberapa kegiatan masyarakat yang selalu kami hadiri setiap akhir dari sambutan kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu hidup aman dan berdampingan.

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Kaimana pasca ujaran kebencian sangat mempengaruhi Pemda Kaimana untuk menanggapi isu tersebut sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meredam isu konflik tersebut salah satunya adalah dengan melakukan dialog antara masyarakat, tokoh-tokoh agama, adat, aparat keamanan yang ada di Kabupaten Kaimana dan di mediasi oleh KESBANGPOL, dari hasil pertemuan tersebut menyatakan sikap dan menyatukan pandangan agar tetap hidup damai untuk kemajuan Kabupaten Kaimana. Hal ini dilakukan oleh pemda untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau tindakan anarkisme.

“Yang kami lakukan adalah sosialisasi dan berdiskusi serta menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan isu rasisme dan kami mengagendakan pertemuan antara Pemda, DPRD, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama serta masyarakat. Hasil dari pertemuan itu adalah kita bersepakat Kota Kaimana jangan terprovokasi dengan isu rasisme sehingga masyarakat Kaimana tetap hidup aman dan damai, (Ferdinan Mardi.48).”

Narasi dalam makna kutipan wawancara di atas bahwa dari pihak keamanan memang sudah siaga dan sudah memantau lewat media sosial begitu isu konflik itu muncul masyarakat merespon dengan menggelar aksi, mendengar hal itu dari pihak keamanan langsung turun untuk mengawal aksi masyarakat dalam perjalanan pihak keamanan selalu berupaya untuk menghimbau kepada massa aksi untuk tidak melakukan tindakan anarkis, masa aksipun menerima himbauan karena demi banyak orang yang ada di Kabupaten Kaimana sehingga hal inilah yang membuat situasi semakin kondusif. Dan setelah itu dari pihak keamanan Melakukan sosialisasi/ pertemuan dengan Pemda, tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat dan bersepakat untuk tidak terprovokasi dengan isu rasisme sehingga Kabupaten Kaimana tetap aman dan damai.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran stakeholder sangat dibutuhkan terkait perkembangan masyarakat melalui kebijakan atau sosialisai serta himbauan terhadap masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dan stakeholder tak dapat dipisahkan melainkan kerja sama sehingga terwujudnya masyarakat Kaimana yang sejahtera dan menjauhkan masyarakat dari konflik yang memecah belah masyarakat.

Dari hasil kutipan dan kesimpulan wawancara di atas maka penulis menelaah dengan prespektif Ralf Dahrendorf sebagai berikut:

Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu melainkan di posisi. Mereka yang menduduki posisi otoritas berharap mampu mengendalikan bawahan sehingga sifatnya tentatif, tidak konstan. Hal tersebut didasarkan pada argumen Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun atas sejumlah unit yang ia sebut sebagai asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Hal tersebut dapat di lihat dari pimpinan tokoh masyarakat, adat, agama, Pemda Kaimana, pihak keamanan yang mampu mengendalikan masyarakat Kaimana sehingga masalah ujaran kebencian tidak berefek pada konflik yang berkepanjangan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul “**Kohesi Sosial Masyarakat Kaimana di Tengah Konflik Papua**” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengapa Kaimana Tidak Terimbas Konflik Papua?

Bahwa dalam kesempatan kerja dalam pemerintahan serta kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat asli papua dan non papua di Kabupaten Kaimana mempunyai kesempatan yang sama dan selalu menjaga hubungan keharmonisan yang sudah di tanamkan sejak dahulu antara masyarakat asli Papua maupun non papua di Kabupaten Kaimana sehingga isu konflik Papua tidak menjadi domain untuk memecah belah persaudaraan yang ada di Kabupaten Kaimana.

2. Bentuk-bentuk Kohesi Sosial

Bentuk kohesi sosial yang dilakukan adalah dengan cara Sikap saling menghargai dan saling menghormati. Masyarakat Kaimana dalam merespon isu rasisme dengan solidaritas yang sangat kuat sehingga menggelar demonstrasi dengan aksi damai serta lebih bijak dan mengedepankan rasa persaudaraan.

3. Peran Stakeholder

Peran stakeholder sangat di butuhkan terkait perkembangan masyarakat melalui kebijakan atau sosialisai serta himbauan terhadap

masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dan stakeholder tak dapat di pisahkan melainkan kerja sama sehingga terwujudnya masyarakat kaimana yang sejahtera dan menjauhkan masyarakat dari konflik yang memecah belah masyarakat.

B. Saran

Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada berbagai kalangan berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagaimana yang dijelaskan dalam penulisan karya ilmiah ini, saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus mempertahankan nilai adat istiadat, budaya, yang berbeda di Kabupaten Kaimana, dan menjunjung tinggi toleransi, serta menghargai perbedaan yang ada di kaimana agama, ras, warna kulit dan lain-lain dengan bersilaturahmi.
2. Tanamkanlah kesadaran terhadap generasi berikutnya terkait sikap saling menghargai dan mengormati antara sesama masyarakat melalui sosialisasi dari Pemda kabupaten Kaimana atau instansi-instansi terkait.
3. Perlu dilakukan penelitian serupa sebagai pembandingan dan memperluas pengetahuan mengenai kohesi sosial masyarakat Kaimana di tengah konflik Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 2007 *“Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan”*, PT Bumi Aksara: Jakarta.

Ahmadi Abu, *dkk*, 2007 *“Sosiologi Pendidikan”*, PT Rineka Cipta: Jakarta.

Akbar *dkk*, 2009 *“Metodologi Penelitian Sosial”*, Bumi Aksara: Jakarta.

Ambo Upe, 2010:157-169. *“Tradisi aliran dalam sosiologi”*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Bollen, K. A., & Hoyle, R. H, 1990:479-504. *“ Cohesion A Conceptual and Empirical Examination Social Forces”*.

Coser, Lewis. 1956 *“The Function of Social Conflict”*, Free Pres: New York.

Francis Diana, 2006 *“Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial”*, Quills: Yogyakarta.

Fajri M.Kasim dan Abidin Nurdin, 2015 *“Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi”*, Unimal Press: Nanggroe Aceh Darussalam.

Forrest Ray dan Kearns Ade, 2001 *“Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood”* Urban Studies Journal Limited.

Fisher Simon, *dkk.*, 2001 *“Mengelola Konflik – Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak”*, The British Council, Zed Books: Jakarta

Gunawan, 2007 “ *Teknik Analisis Data Kualitatif* “ Makalah Penataran Lokakarya Analisis Data Kualitatif Lemlit UNY.

G. Pruitt Dean dan Jeffrey Z Rubin, 2004 “*Teori Konflik Sosial*”, Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Gillin J.L dan J.P. Gillin, 1954, “*Cultural Sociology*”, The Millan Co: New York.

Kulig J, Townshend I, Awosoga O, Fan HY. 2014. *Social cohesion and resilience across communities that have experienced a disaster. Natural Hazards*. [Internet]. [Diunduh 9 April 2017]. Dapat diunduh di: https://www.researchgate.net/profile/Olu_Awosoga/publication/268743797_Social_cohesion_and_resilience_across_communities_that_have_experienced_a_disaster/links/56b382e308ae1f8aa4534b03.pdf

Linton Ralph, 1936 “*The study of Man*”, D. Appleton Century Company: New York, London.

Myers DG, 2010, “*Social Psychology*”, <http://fmtigers.org/wp-content/uploads/2015/08/Myers-D.-G.2010.-Psychology-9th-edition2.pdf>. diakses 8 Januari 2016

Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong, 2007 “*Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*”, Kencana Prenada Media: Jakarta.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2005 “ *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam* ”, Kencana: Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1982 “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, CV. Rajawali: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006 "*Sosiologi Suatu Pengantar*", PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1987 "*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*", Rajawali: Jakarta.

Soerjono Soerjono, 1986 "*Sosiologi suatu pengantar*", PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2009:212-213, "*Peranan Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*", Rajawali Pers: Jakarta.

Sugiyono, 2012 "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Alfabeta: Bandung.

Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana.

Salam Burhanuddin, 2002 "*Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*", Rineka Cipta: Jakarta.

Wirawan, 2010 "*Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*", Salemba Humanika: Jakarta.

Wijono, S., 1993 "*Konflik dalam Organisasi/Industri dengan Strategi Pendekatan Psikologis*", Satya Wacana: Semarang.

Tejokusumo Bambang, 2014 "*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengertahuan Sosial. Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Dasar Konsentrasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*". Universitas Negeri Malang.

Taylor E, S., 2009 "*Psikologi Sosial*", Kencana: Jakarta

**LAMPIRAN 1 : TRANSKIP WAWANCARA MASYARAKAT DAN
STAKEHOLDER KABUPATEN KAIMANA**

Identitas Responden :

Nama :

Pekerjaan :

Usia :

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Pandangan Saudara Terkait kesempatan kerja dalam pemerintahan di Kabupaten Kaimana apakah sama antara OAP dan Non OAP?
2. Bagaimana pendapat Saudara terkait kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Kaimana apakah sama antara OAP dan Non OAP?
3. Bagaimana pandangan Saudara terkait keterlibatan masyarakat dalam menjaga keharmonisan di kabupaten Kaimana?
4. Bagaimana Pandangan Saudara Terkait Hubungan Antara Masyarakat Asli Papua dan Pendatang di Kabupaten Kaimana?
5. Bagaimana pandangan Saudara terkait keterlibatan masyarakat kaimana dalam menanggapi konflik Papua?
6. Bagaimana pandangan Saudara terkait respon masyarakat terhadap konflik Papua, sehingga tidak terjadi kerusuhan di Kabupaten Kaimana?
7. Menurut Saudara apa yang membuat perbedaan isu sara tidak menjadi sebuah tolak ukur untuk saling membedakan di kabupaten Kaimana?

8. Menurut Saudara apakah ada suatu kebiasaan masyarakat kaimana dalam menjunjung norma dan nilai social di antara sesama masyarakat Kaimana?
9. Menurut Saudara bagaimana perilaku moral masyarakat kaimana di tengah konflik Papua?
10. Hal apa yang membuat masyarakat Kaimana tetap menyatu di tengah konflik Papua?
11. Menurut Saudara bagaimana tingkat solidaritas masyarakat Kaimana menanggapi isu konflik Papua?
12. Bagaimana kesejahteraan di bidang ekonomi?
13. Bagaimana kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan apakah sama antara OAP dan Non OAP?
14. Apakah ada bantuan dari Pemda di bidang pendidikan?
15. Bagaimana hubungan masyarakat dengan Pemda?
16. Bagaimana kesempatan kerja apakah sama antara masyarakat OAP dan non OAP?
17. Bagaimana peran kepolisian untuk menciptakan keamanan ditengah konflik Papua?
18. Apa yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk menciptakan keamanan di tengah konflik Papua?

LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI



Dokumentasi demonstrasi masyarakat Kabupaten Kaimana dalam menanggapi isu rasisme, serta menerima pernyataan sikap dari masyarakat oleh Bupati.



Dokumentasi peneliti bersama responden



Dokumentasi peneliti bersama wakil bupati Kabupaten Kaimana terkait isu rasial.



Dokumentasi peneliti bersama pihak keamanan Kabupaten Kaimana.



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Cassuarina Krooy, Telepon/Fax : (0957) 21853, Kaimana - Papua Barat

Kaimana , 17 Maret 2020

Nomor : 423 / ~~42~~ / KesPol / 2020
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth : Dekan Universitas Bosowa
Makasar
Di -
Makasar

Berdasarkan surat Ijin Penelitian Nomor : A.003/FSP/UNINBOS/I/2020, Tanggal 7 Januari 2020 dari Universitas Bosowa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Makasar tentang Permintaan Ijin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama :

NAMA : KANISIUS LAGA DONI

NIM : 45 15 022 005

JUDUL PENELITIAN : **"KOHESI SOSIAL MASYARAKAT KAIMANA DITENGAH KONFLIK PAPUA"**

WAKTU : JANUARI - FEBRUARI 2020

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut yang namanya tercantum di atas telah selesai melakukan penelitian di Kabupaten Kaimana.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Kaimana

SYAMSUDIN MASWATU, S.Sos

Pembina IV/a

Nip. 19581206 198410 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kaimana di Kaimana
2. Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.003/FSP/UNIBOS/I/2020
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
PEMDA KAB. KAIMANA
Di-
Kabupaten Kaimana

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Kanisius Laga Doni
NIM : 45 15 022 005
Judul penelitian : Kohesi Sosial Masyarakat Kaimana ditengah Konflik Papua.
Tempat : Kantor PEMDA KAB. KAIMANA
Waktu : Januari – Februari 2020

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 07 Januari 2020
Dekan Fisp Unibos



Arief Wreaksono, S.Ip, M.A
Nid. 0411 452 71107602

Tembusan :
1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Cassuarina Krooy, Telepon/Fax. : (0957) 21853, Kaimana - Papua Barat

Kaimana, 21 Februari 2020

Nomor : 070 / 33 / KesPol/2020
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada
Yth : Kapolres Kaimana

Di -
Kaimana

Berdasarkan surat dari Universitas Bosowa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Makasar Nomor : A.003/FSP/UNINBOS/I/2020 , tanggal, 7 Januari 2020 tentang Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi, maka dengan ini diberikan ijin Penelitian kepada :

NAMA : KANISIUS LAGA DONI
NIM : 45 15 022 005
JUDUL PENELITIAN : **"KOHESI SOSIAL MASYARAKAT KAIMANA DITENGAH KONFLIK PAPUA"**
WAKTU : JANUARI - FEBRUARI 2020

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Sebelum melaksanakan kegiatan Penelitian harus melapor kedatangan kepada Bupati cq. Kantor Kesbangpol setempat;
2. Surat ini berlaku hanya untuk kegiatan Ijin Permintaan izin Penelitian tersebut di atas;
3. Mentaati semua ketentuan peraturan yang berlaku serta adat istiadat setempat;
4. Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila tidak mengindahkan ketentuan dimaksud;
5. Apabila masa berlaku surat ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Ijin belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali pada instansi pemohon;
6. Setelah selesai Penelitian harap melapor ke Bupati Kaimana Cq. Kantor Kesbangpol Kabupaten Kaimana.

Demikian ijin penelitian ini di berikan untuk dipergunakan sepenuhnya dan atas bantuannya di sampaikan terimakasih.

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN KAIMANA



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaimana di Kaimana
2. Kepala Kantor Kominfo Kaimana di Kaimana
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Cassuarina Krooy, Telepon/Fax : (0957) 21853, Kaimana - Papua Barat

Kaimana, 21 Februari 2020

Nomor : 070 / 32 / KesPol/2020
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth : Sekretaris Daerah
Kabupaten Kaimana
Di -

Kaimana

Berdasarkan surat dari Universitas Bosowa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Makasar Nomor : A.003/FSP/UNINBOS/I/2020 , tanggal, 7 Januari 2020 tentang Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi, maka dengan ini diberikan ijin Penelitian kepada :

NAMA : KANISIUS LAGA DONI

NIM : 45 15 022 005

JUDUL PENELITIAN : "KOHESI SOSIAL MASYARAKAT KAIMANA DITENGAH KONFLIK PAPUA"

WAKTU : JANUARI - FEBRUARI 2020

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Sebelum melaksanakan kegiatan Penelitian harus melapor kedatangan kepada Bupati cq. Kantor Kesbangpol setempat;
2. Surat ini berlaku hanya untuk kegiatan Ijin Permintaan izin Penelitian tersebut di atas;
3. Mentaati semua ketentuan peraturan yang berlaku serta adat istiadat setempat;
4. Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila tidak mengindahkan ketentuan dimaksud;
5. Apabila masa berlaku surat ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Ijin belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali pada instansi pemohon;
6. Setelah selesai Penelitian harap melapor ke Bupati Kaimana Cq. Kantor Kesbangpol Kabupaten Kaimana.

Demikian Ijin penelitian ini di berikan untuk dipergunakan seperlunya dan atas bantuannya di sampaikan terimakasih.



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaimana di Kaimana
2. Kepala Kantor Kominfo Kaimana di Kaimana
3. Arsip.